



***Offshore Balancing* Amerika Serikat Pada Era Donald Trump Terhadap Rusia Dalam Konflik Suriah**

Rehan Wahyu Muhammad^{1*}, Roby Rakhmadi.², Astiwi Inayah³

¹The Student of International Relations Study, ^{2,3}Lecturer of International Relations Study

*Correspondent author: International Relations Study Program, University of Lampung.

Phone: +6281218291225. Email: 34rehanmuhammad@gmail.com

ABSTRAK

Konflik Suriah telah menarik perhatian global dan meresahkan masyarakat internasional. Konflik ini menjadi semakin tereskalasi dan tidak kunjung usai karena banyaknya aktor yang terlibat, baik dari internal maupun eksternal, mulai dari negara berdaulat hingga organisasi dan kelompok kepentingan. AS dan Rusia sebagai negara dengan identitas dan pengaruh yang besar di dunia, juga ikut terlibat dalam konflik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka yang bersumber dari situs resmi *United State Institute of Peace*, *U.S. Department of State*, *U.S. Department of Defense*, *Council of Foreign Relations*, *Congressional Research Service*, dan *Defense White Paper* tentang Stabilitas dan Rekonstruksi Suriah dari *American Security Project*. Penelitian ini menggunakan konsep *grand strategy*, *offshore balancing*, kepentingan nasional, dan aksi-reaksi untuk melihat alasan AS pada era Presiden Donald Trump menerapkan strategi *offshore balancing* dalam menghadapi Rusia pada konflik Suriah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa AS pada era Presiden Donald Trump yang penulis anggap telah menerapkan strategi *offshore balancing* untuk mengejar hegemoni global dengan menjaga keseimbangan kekuatan dan integritas teritorial di wilayah Timur Tengah. AS juga melakukan upaya penjatuhan Rezim Assad untuk mencegah Rusia sebagai negara yang berpotensi menjadi hegemon baru pada sistem internasional, yang dapat mengancam keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, serta mengancam kepentingan nasional AS dalam bidang keamanan dan tatanan dunia.

Kata kunci: *Offshore Balancing*, Amerika Serikat, Rusia, Konflik Suriah

ABSTRACT

The Syrian conflict has attracted global attention and unsettled the international community. This conflict is escalating and never ending because of the many actors involved, both internal and external, from sovereign states to organizations and interest groups. The US and Russia, as countries with big identities and influences in the world, were also involved in the conflict. This research is a qualitative research using data collection techniques in the form of literature studies sourced from the official website of the United State Institute of Peace, U.S. Department of State, U.S. Department of Defense, Council of Foreign Relations, Congressional Research Service, and the Defense White Paper on the Stabilization and Reconstruction of Syria from the American Security Project. This study uses the concepts of grand strategy, offshore balancing, national interests, and actions to see the reasons for the US in the era of President Donald Trump implementing an offshore balancing strategy in dealing with Russia in the Syrian conflict. The results of the study show that the US during the era of President Donald Trump, which the authors consider, has implemented an offshore balancing strategy to pursue global hegemony by maintaining a balance of power and territorial integrity in the Middle East region. The US also made efforts to overthrow the Assad regime to prevent Russia from becoming a country that has the potential to become a new hegemon in the international system, which could threaten the balance of power in the Middle East, as well as threaten US national interests in the field of security and world order.

Keywords: Offshore Balancing, United States, Russia, Syrian Conflict

PENDAHULUAN

Suriah merupakan suatu negara yang berada di wilayah Timur Tengah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad sejak tahun 2000. Pada tahun 2010, terdapat gerakan revolusioner yang menuntut reformasi politik di kawasan Timur Tengah yang disebut dengan ‘*The Arab Springs*’ atau Musim Semi Arab. Fenomena ini diawali dengan sebuah protes penurunan rezim di Tunisia, yang pada akhirnya menyebar ke berbagai negara di Dunia Arab seperti Libya, Mesir, Yaman, Bahrain dan Suriah (Sahide et al., 2015). Fenomena ini memicu konflik internal di Suriah yang terjadi antara pihak pemerintah Suriah melawan pihak oposisi, yang dimana tidak hanya terdapat penggunaan senjata konvensional, melainkan juga senjata kimia, untuk mencapai kepentingan masing-masing.

Pada tahun 2013, Amerika Serikat (AS) melakukan intervensi pertamanya secara langsung pada konflik yang terjadi di Suriah dengan meluncurkan operasi militernya, untuk merespon adanya aksi pembentukan negara oleh *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS) yang menjadikan Kota Raqqa sebagai ibu kota negaranya, serta menyerang kelompok oposisi lain untuk merebut posisi utama sebagai pasukan non-pemerintah yang ada di Suriah. Selain itu, AS memberikan bantuan finansial dan logistic kepada pihak oposisi sebagai bentuk dukungannya terhadap pihak oposisi yang menuntut adanya penurunan Rezim Assad, serta untuk melawan ISIS di Suriah, dan pemberian sanksi kepada Pemerintah Suriah. Di sisi lain, Rusia yang memihak pada Rezim Assad juga mengintervensi konflik di Suriah dengan meluncurkan serangan udara pertamanya yang ditargetkan kepada pihak oposisi.

Kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Trump pada konflik Suriah lebih menekankan pada pemanfaatan instrumen militer AS, serta penjatuhan sanksi kepada beberapa pihak yang bersekutu dengan Rezim Assad. Selain itu, Trump juga memanfaatkan adanya ketidakstabilan, gejolak dan transisi kekuasaan yang terjadi pada suatu negara, dengan melakukan kerja sama dengan Arab Saudi sebagai bentuk pemanfaatan kekuatan regional di Timur Tengah. Tujuan utama dari AS yang disampaikan oleh Trump dalam konferensi persnya, yang berkaitan dengan ISIS, proses politik di Suriah, dan Iran, berbeda dengan sikap AS dalam intervensi yang dilakukannya pada konflik Suriah. Kebijakan luar negeri yang diterapkan AS tidak terbatas pada masa konflik Suriah dan pada kepentingan

pertahanan negaranya saja, melainkan jauh lebih luas yang meliputi masa perang dan damai, dan tentang mengejar kepentingan tatanan dunia.

Perubahan sistem internasional yang disebabkan oleh runtuhnya Uni Soviet dan peristiwa 9/11, mendesak AS untuk menerapkan strategi besar baru. Strategi AS telah berubah dari masa Pemerintahan George W. Bush hingga Donald Trump, dari 'keunggulan' menjadi 'keseimbangan lepas pantai' (Biafora, 2018). AS telah menggunakan kekuatannya tidak hanya untuk memecahkan masalah global, melainkan juga untuk mempromosikan tatanan dunia berdasarkan lembaga internasional, perwakilan pemerintahan, pasar terbuka, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurut Mearsheimer dan Waltz, dengan mengadopsi strategi 'keseimbangan lepas pantai', AS akan lebih berfokus pada sesuatu yang benar-benar vital, yaitu mempertahankan dominasi AS dan melawan potensi hegemoni dari negara lain di Eropa, Asia Timur Laut, dan Teluk Persia, dengan tujuan untuk mempertahankan keunggulan AS di masa depan dan melindungi kebebasan dalam negeri (Mearsheimer & Walt, 2016). Hal ini dilakukan AS sebagai bentuk reaksi dari adanya aksi intervensi yang dilakukan oleh Rusia sebagai negara Eropa yang berpotensi menjadi hegemon baru pada sistem internasional.

Sebelum penelitian penulis, terdapat beberapa penelitian dengan topik penelitian yang bersinggungan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan sehingga dijadikan sebagai rujukan untuk jurnal ini sebagai berikut:

Pertama, sebuah skripsi karya Firman Zahendra, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, tahun 2018, yang berjudul "Upaya Containment Amerika Serikat terhadap Rusia dalam Konflik Suriah". Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menggambarkan upaya AS dalam mengerahkan kapabilitasnya untuk mengatasi Rusia pada konflik Suriah, guna menjaga kepentingan nasionalnya melalui pembendungan dan proxy war. Pada penelitian ini, penulis menggunakan topik kebijakan luar negeri yang diterapkan AS untuk mengatasi Rusia pada konflik Suriah guna menjaga kepentingan nasionalnya, untuk dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian agar dapat menambah wawasan mengenai topik yang dibahas.

Kedua, sebuah skripsi karya Anggi Rahmawati, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, tahun 2020, yang berjudul "Upaya Sekuritisasi Amerika Serikat dalam Konflik di Suriah pada Masa Kepemimpinan Donald Trump". Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan keterlibatan AS dalam konflik Suriah yang mengupayakan kebijakan luar negeri yang berupa intervensi militer terhadap Pemerintahan Assad, serta pemberian sanksi keuangan dan pembatasan jalan bagi Bashar al-Assad, guna mempertahankan sekuritisasi di wilayah Timur Tengah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan topik kebijakan luar negeri berupa intervensi dan pemberian sanksi kepada Rezim Assad yang dilakukan AS pada era Presiden Donald Trump guna mempertahankan sekuritisasi di Timur Tengah, untuk dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian agar dapat menambah wawasan mengenai topik yang dibahas.

Ketiga, sebuah skripsi karya Muhammad Maharani Soebroto, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember, tahun 2019, yang berjudul "Intervensi Militer Amerika Serikat di Suriah Era Donald Trump". Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan intervensi militer yang dilakukan oleh AS yang disebabkan karena tereskalasinya konflik di Suriah yang ditandai dengan penggunaan senjata kimia, guna memberantas terorisme, mempromosikan demokrasi, menjaga stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah, serta mencapai kepentingan ekonomi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan topik konflik suriah dan intervensi militer yang dilakukan AS pada era Presiden Donald Trump guna mencapai

kepentingan nasional AS, untuk dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian agar dapat menambah wawasan mengenai topik yang dibahas.

Keempat, sebuah jurnal internasional karya Abbas Mossalanejad, yang berjudul “The Middle East Security and Donald Trump’s Grand Strategy”. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah yang terancam oleh terorisme dan risiko proliferasi nuklir, serta strategi AS di bawah kepemimpinan Donald Trump di kawasan Timur Tengah yang memanfaatkan konsep offshore balancing, proxy war dan peningkatan kekacauan pada negara konflik. Pada penelitian ini, penulis menggunakan topik strategi offshore balancing yang diterapkan AS pada era Presiden Donald Trump dalam menjaga stabilitas keamanan di Timur Tengah dari terorisme dan proliferasi nuklir, untuk dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian agar dapat menambah wawasan mengenai topik yang dibahas.

Kelima, sebuah jurnal karya Agastya Wardhana dan Vinsensio M. A. Dugis, yang berjudul “Selective Isolationism Grand Strategy: United States Foreign Policy During Trump Administration”. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan tentang pola kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump melalui analisis grand strategy atau strategi tingkat tinggi di tengah kondisi turunnya hegemoni AS. Pada penelitian ini, penulis menggunakan topik pola kebijakan luar negeri AS pada era Presiden Donald Trump yang menerapkan strategi tingkat tinggi untuk mengatasi turunnya hegemoni AS di dunia, untuk dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian agar dapat menambah wawasan mengenai topik yang dibahas.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat beberapa kesamaan yang ditemukan, yaitu aktor yang terlibat: AS; Rusia dan Suriah, serta isu yang digunakan: konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di Suriah; dan strategi tingkat tinggi yang diterapkan oleh AS dalam mencapai kepentingannya. Adapun beberapa penelitian yang menggunakan konsep dan teori yang sama dengan penelitian ini, seperti konsep offshore balancing dan teori kepentingan nasional. Terlepas dari banyaknya kesamaan dari penelitian terdahulu, penelitian ini ditulis dengan mengangkat fokus yang berbeda untuk memperbaharui penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan, yaitu penerapan strategi offshore balancing oleh AS dalam menghadapi Rusia pada era Presiden Donald Trump dalam konflik di Suriah. Hal ini dapat dilihat dari intervensi yang dilakukan AS pada konflik di Suriah untuk mengontrol kawasan Timur Tengah dari tahun 2017 – 2021

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis objek yang diteliti. Penelitian ini mengeksplorasi, memaparkan serta mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata yang berbentuk narasi, yang kemudian akan dianalisis menggunakan teori *grand strategy*, kepentingan nasional, konsep *offshore balancing* dan *action-reaction* untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dengan strategi *indirect-unreactive*, yang dimana bersumber dari *United States Institutes of Peace (USIP)*, *U.S. Department of State (USDOS)*, *U.S. Department of Defense (USDOD)*, *The Council on Foreign Relations (CFR)*, laporan tahunan dari *Congressional Research Service (CSR)*, dan *Defense White Paper* tentang Stabilisasi dan Rekonstruksi Suriah dari *American Security Project (ASP)*, serta beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik serupa.

PEMBAHASAN

Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dan Rusia

Rusia pertama kali mengakui kedaulatan AS pada tanggal 28 Oktober 1803, dan hubungan diplomatik antara AS dan Rusia secara resmi terjadi pada tahun 1809 (USDOS, 2021). Namun hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut terputus setelah Revolusi Rusia tahun 1917 (USDOS, 2021). Meskipun hubungan diplomatik kedua negara tersebut tidak pernah secara resmi diputuskan, AS tidak pernah mengakui adanya hubungan diplomatik dalam bentuk apapun dengan Rusia hingga pada tanggal 16 November 1933 (USDOS, 2021). Kemudian pada tanggal 25 Desember 1991, AS mengakui Federasi Rusia sebagai bekas Uni Soviet (USDOS, 2021).

Hubungan antara AS dan Rusia dapat dilihat pada konflik Perang Dunia ke-I, Perang Dunia ke-II, dan Perang Dingin. Pada Perang Dunia ke-I, AS terlibat dalam pihak yang sama dengan Rusia, yaitu pihak sekutu yang terdiri dari negara utama seperti Prancis, Inggris, Rusia dan Italia, melawan pihak musuh yang terdiri dari Jerman, Bulgaria, Kekaisaran Ottoman, dan Austria. Hal ini menandakan adanya peningkatan hubungan antara AS dan Rusia karena berada pada satu pihak yang sama dalam menghadapi musuh pada konflik tersebut. Kemudian pada Perang Dunia ke-II, AS juga berada pada satu pihak yang sama dengan Rusia dalam melawan Jerman. Setelah runtuhnya Jerman, pengaruh dan kekuatan AS dan Rusia berkembang pesat. Sistem internasional pada masa pasca Perang Dunia ke-II menjadi bipolar, yang dipimpin oleh AS dan Rusia. Adanya perbedaan kepentingan antara AS dan Rusia sebagai dua kekuatan besar yang mendominasi, baik pada bidang ideologi, militer, maupun ekonomi, mengarah kepada konflik Perang Dingin. Meskipun kedua negara tersebut tidak pernah terlibat dalam perang secara langsung, namun persaingan dalam upaya mendominasi global tetap diupayakan oleh masing-masing pihak dengan memperluas pengaruh ideologi yang dimiliki AS, yaitu Demokratis – Kapitalis dan yang dimiliki Rusia, yaitu Komunis – Sosialis. Kedua negara saling bersaing untuk memperebutkan dominasi global guna membangun tatanan dunia yang diinginkan dari masing-masing pihak, yang menyebabkan perlombaan senjata dan ancaman perang nuklir.

Berakhirnya Perang Dingin, yang dideklarasikan oleh Pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev dan Presiden AS, George Bush pada pertemuannya di tahun 1989, meningkatkan hubungan antara kedua negara adidaya itu. Setelah pecahnya Uni Soviet, bantuan AS kepada Rusia dengan reformasi ekonomi pasar, membuat Rusia bergabung dengan Bank Dunia dan *International Monetary Funding* (IMF), dan pada tahun 1997, Rusia diterima di G8 (Russel, 2022). Kedua negara tersebut telah menandatangani serangkaian perjanjian pengendalian senjata dan bekerja sama di Stasiun Luar Angkasa Internasional (Russel, 2022). Namun di sisi lain, terlepas dari adanya kerja sama yang dilakukan, ketegangan antara AS dan Rusia juga semakin meningkat. Perbedaan mendasar antara kedua negara tersebut sudah terlihat sejak Rusia berada di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin pada tahun 1999, dan hubungan keduanya semakin tegang sejak masa Pemerintahan Vladimir Putin tahun 2000 (Russel, 2022). Meskipun kedua belah pihak cenderung menghindari konflik langsung dengan segala cara, tetapi sebagian besar perjanjian kontrol senjata bilateral yang membantu menjaga keseimbangan militer antara kedua negara tersebut telah memudar dan hilang. Oleh karena itu, AS dan Rusia pada bulan Juni 2021, melakukan pembicaraan damai pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas strategis (Russel, 2022). Di sisi lain, perdagangan dan investasi antara AS dan Rusia bersifat terbatas, karena sejak tahun 2014, keduanya telah menerapkan beberapa sanksi ekonomi untuk membendung pengaruh dari pihak yang berlawanan (Russel, 2022).

Kebijakan luar negeri AS pasca Perang Dingin berusaha untuk mendorong Rusia agar menggunakan perilaku penyeimbang untuk melawan hegemoni global AS, yang menjadi alasan mengapa AS dan Rusia tidak berhasil mengembangkan hubungan kerja sama setelah kebijakan 'reset' diluncurkan pada tahun 2009 (Kotova, 2014). Selain itu, rezim Rusia yang lebih otoriter memperburuk hubungan AS-Rusia, yang mengakibatkan kebijakan tersebut gagal (Kotova, 2014). Peningkatan konfrontasi antara AS dan Rusia ini juga dapat dilihat dari keterlibatan kedua negara tersebut pada konflik-konflik internasional, baik konflik domestik suatu negara, maupun global, seperti konflik di Afghanistan, Iraq, Libya, Ukraina, Korea, Georgia, dan di Suriah.

Pada konflik Suriah, kepentingan nasional AS dan Rusia berfokus pada upaya perluasan hegemoni masing-masing negaranya. Selain itu, kedua negara tersebut saling melakukan upaya pencegahan terhadap satu sama lain agar tidak adanya *rising power* pada wilayah pengaruhnya. Dalam hal ini, Suriah yang terletak di Timur Tengah memiliki keuntungan tersendiri bagi kedua negara baik AS maupun Rusia. Hal ini didasari oleh adanya faktor-faktor yang dapat menguntungkan kedua negara tersebut. Misalnya, bagi AS, Suriah dapat menjadi salah satu wadah bagi AS untuk memperluas pengaruh negaranya di wilayah Timur Tengah. AS berusaha untuk meraih kembali hegemoni negaranya dengan melakukan control pada tiga wilayah yang penting di dunia, yaitu Eropa, Teluk Persia atau Timur Tengah dan Asia Timur Laut. Disisi lain, Rusia yang berdasarkan sejarah memiliki hubungan yang erat dengan Suriah, juga berusaha untuk mengembalikan kejayaan negaranya. Hal ini dilakukan Rusia dengan mencegah AS untuk melakukan penyebaran pengaruh di Timur Tengah. Selain itu, Rusia yang banyak mendapatkan keuntungan dari segi sumber daya alam dari Suriah, juga berusaha untuk tetap menjaga kedekatannya Suriah. Kedua negara ini baik AS maupun Rusia saling mengedepankan kepentingan nasionalnya untuk mendapat tujuan negaranya, baik dalam bidang ekonomi, keamanan, maupun tatanan dunia.

Pihak pemberontak di Suriah telah memberikan kesempatan bagi pemerintah AS dan Rusia untuk meningkatkan dan mengkonsolidasikan hubungan bilateral mereka dengan Suriah (Dunne, 2012). Pihak pemberontak melihat hubungan bilateral yang baik dengan Suriah sebagai sarana untuk lebih memperluas dan memperkuat lingkup pengaruh mereka di Timur Tengah. Oleh karena itu, pemerintah AS dan Rusia telah menjadi aktor asing yang sangat aktif sejak kerusuhan Suriah dimulai. Sementara dukungan AS untuk kelompok oposisi yang menyerukan Assad untuk mundur untuk mengantar program transisi, Rusia, di sisi lain, telah mendukung banyak proses multilateral yang bertujuan untuk membangun transisi politik di Suriah, tetapi telah menolak untuk mendukung permintaan Assad untuk mundur (Dunne, 2012). Namun, baik pemerintah AS maupun Rusia telah melakukan banyak upaya untuk memberikan dukungan strategis yang membantu mengamankan kepentingan masing-masing pihak di Suriah pada masa perang dan damai.

Menurut Dunne (2012), konflik Suriah bukan lagi tentang konfrontasi antara pemerintah dan yang diperintah, melainkan tentang perjuangan multilateral yang terdapat berbagai kepentingan asing dengan identitas Suriah, dan masa depannya sebagai demokrasi potensial yang dipertaruhkan (Dunne, 2012). Selain itu, meskipun pada konflik Suriah, AS dan Rusia tidak mau bekerja sama dalam hal menentukan nasib Rezim Assad, kedua negara tersebut telah menunjukkan minat yang besar untuk bekerja sama dalam upaya mengalahkan ISIS. Kedua belah pihak sepakat bahwa kelompok teroris ISIS yang dapat mengancam keamanan dunia harus diberantas. Namun, setiap upaya internasional yang ditujukan untuk

menyelesaikan konflik Suriah, akan membutuhkan salah satu dari kedua belah pihak untuk menyerahkan kepentingan nasionalnya.

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dan Rusia di Suriah

1. Kebijakan Luar Negeri serta Alasan Amerika Serikat Terlibat pada Konflik Suriah

Sejak terpilih sebagai Presiden AS pada tahun 2016, Donald Trump bertekad untuk menjadikan AS sebagai negara yang memiliki pengaruh sebesar pada masa pasca Perang Dingin, dengan semboyan “*Make America Great Again*”. Oleh karena itu, Trump menerapkan model kepemimpinan yang dinamakan dengan “*America’s First*”, yang dapat digambarkan dengan adanya permusuhan terhadap partisipasi AS dalam pakta internasional, proteksionisme ekonomi, keengganan terhadap promosi demokrasi, dan nasionalisme yang diwarnai rasial dan isolasionis. Kebijakan luar negeri Trump lebih berfokus pada proteksionisme dan timbal balik daripada perdagangan bebas dan hubungan komersial.

AS lebih tertarik pada skenario pasca konflik daripada penyelesaian konflik pada konflik Suriah. Trump memiliki tiga kepentingan utama pada konflik Suriah, yaitu meningkatkan otoritas regionalnya, mencegah penyebaran pengaruh regional Rusia dan Iran, dan mengalahkan ISIS (Kheyrian, 2019). Penggulingan Assad merupakan prasyarat penting bagi AS untuk meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Jatuhnya Rezim Assad akan melemahkan kekuatan relatif Rusia dan Iran, dan secara timbal balik memperkuat Arab Saudi selaku sekutu AS.

Pada tujuan kebijakan yang mengupayakan kekalahan abadi ISIS, AS telah menjalankan *Operation Inherent Resolve* (OIR) sebagai operasi militer yang ditujukan untuk meningkatkan stabilitas regional di Timur Tengah dengan berfokus pada kontraterorisme terhadap ISIS. Tercatat bahwa sekitar 900 personel AS telah diturunkan untuk melawan ISIS dengan sebagian besar diletakan di *Eastern Syria Security Area* (ESSA), dan 100 personel ditugaskan untuk mendukung pasukan *Jaysh Maghawir al-Thawra* (MaT) di markas militer AS yaitu *al-Tanf Garrison* (ATG) (Humud, 2022). Selain itu, AS juga telah mengalokasikan dana sebesar \$500 juta untuk program operasi militer ‘*The Syrian Train and Equip Program*’ yang disahkan oleh Kongres pada tahun 2014 (Humud, 2022).

Sesuai dengan *National Defense Authorization Act (NDAA) for Fiscal Year 2015*, bagian 1209, *Public Law 113-291*, yang telah diamandemen, program ini memungkinkan USDOD untuk memberikan bantuan, termasuk pelatihan, peralatan, persediaan, tunjangan, pembangunan pelatihan dan fasilitas terkait, dan dukungan, kepada elemen oposisi Suriah, kelompok Suriah lainnya, serta individu yang diperiksa dengan tepat (Humud & Blanchard, 2020). Program ini bertujuan untuk mendukung upaya AS dalam mengalahkan kelompok teroris ISIS dan organisasi teroris lainnya di Suriah, serta mempromosikan kondisi untuk penyelesaian yang dinegosiasikan untuk konflik Suriah, yang dijalankan dengan memanfaatkan intelejen, pengawasan dan kemampuan pengintaian pada koalisi yang

ditujukan (Humud, 2022). Kemudian pada bulan juni 2020, Trump melaporkan kepada Kongres bahwa (Humud & Blanchard, 2020):

“United States Armed Forces are conducting a systematic campaign of airstrikes and other necessary operations against ISIS forces in Iraq and Syria and against al-Qa’ida in Syria. A small presence of United States Armed Forces remains in strategically significant locations in Syria to conduct operations and secure critical petroleum infrastructure, in partnership with indigenous ground forces, against continuing terrorist threats emanating from Syria.”

“Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sedang melakukan kampanye sistematis serangan udara dan operasi lain yang diperlukan terhadap pasukan ISIS di Irak dan Suriah dan terhadap al-Qa’ida di Suriah. Kehadiran kecil Angkatan Bersenjata Amerika Serikat tetap berada di lokasi strategis yang signifikan di Suriah untuk melakukan operasi dan mengamankan infrastruktur perminyakan yang penting, dalam kemitraan dengan pasukan darat pribumi, melawan ancaman teroris yang terus berlanjut yang berasal dari Suriah.”

– Donald Trump

Selain untuk memerangi ISIS, USDOD telah menyatakan bahwa pasukan AS di Suriah berhak untuk membela diri terhadap ancaman apapun, termasuk mengamankan ladang minyak (Humud & Blanchard, 2020). Trump juga menyatakan hal yang sama pada bulan Oktober, 2019 bahwa, “kita mungkin harus berjuang untuk minyak. Tidak masalah, mungkin orang lain menginginkan minyak, dalam hal ini mereka bertengkar hebat” (Humud & Blanchard, 2020). Selain itu, Wakil Presiden Pence juga menyatakan pada bulan berikutnya bahwa pasukan AS di Suriah akan mengamankan ladang minyak agar tidak jatuh ke tangan baik ISIS atau Iran atau rezim Suriah (Humud & Blanchard, 2020).

Pada tujuan kebijakan yang mengupayakan penyelesaian politik untuk konflik Suriah, AS terus melakukan advokasi yang dinegosiasikan antara Rezim Assad dan pasukan oposisi Suriah sesuai dengan *United Nations Security Council Resolution* (UNSCR) 2254, tentang penyusunan konstitusi baru dan pemilihan yang diawasi oleh PBB (Humud & Blanchard, 2020). Selain itu, menurut USDOS, pemerintahan Trump sejak tahun 2011 telah memberikan lebih dari \$1,3 miliar kepada Suriah untuk membantu proyek stabilisasi di daerah non-rezim sebagai upaya penyeimbang terhadap pengaruh Rusia, Iran dan Rezim Assad (Humud, 2022). Namun, pada bulan Maret 2018, Trump menyampaikan melalui pidato politik Ohio bahwa akan menghentikan pengeluaran yang direncanakan sebesar \$200 juta dalam bentuk uang untuk menstabilkan dan membangun kembali wilayah Suriah Timur yang dikendalikan oleh pasukan AS dan SDF (Ford, 2018). Hal ini dilakukan karena Trump menginginkan negara-negara sekutu AS di Teluk Persia, seperti Arab Saudi, untuk menstabilkan dan membangun kembali Suriah (Ford, 2018).

Selain itu, AS bersama dengan Turki, Arab Saudi, Inggris, Jerman, Prancis, dan beberapa negara serta badan-badan internasional lainnya, bergabung dalam ‘*The Group of Friends of the Syrian People*’. Grup ini merupakan sebuah kolektif diplomatic internasional

yang membicarakan tentang apa saja yang perlu dilakukan di konflik Suriah (Danin, 2012). Grup ini berusaha untuk meningkatkan tekanan kepada Rezim Assad, serta menyerukan komunitas internasional terutama negara-negara anggota UNSC untuk bersatu dan mengambil tindakan yang tegas agar terjadi perubahan pada konflik Suriah.

Terdapat dua proses negosiasi politik yang dijalankan oleh AS dalam upaya penyelesaian politik untuk konflik Suriah, yaitu proses Jenewa dan proses Astana. Panitia Konstitusi pada dua proses negosiasi tersebut terdiri dari 150 delegasi, yang terdiri dari 50 delegasi yang mewakili Rezim Assad, 50 mewakili oposisi Suriah dan 50 lainnya merupakan warga negara Suriah yang dipilih oleh PBB (Humud & Blanchard, 2020).

Sejak kampanye pemilu 2016, Trump bertekad untuk menghancurkan segala bentuk terorisme di dunia. Maka dari itu, Trump memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mencapai kekalahan abadi ISIS, bukan untuk memperbaiki Suriah. Pemerintahan Trump memiliki kepentingan yang signifikan dalam intervensi yang dilakukannya pada konflik Suriah. Kepentingan ini mengadopsi pendekatan *'three-D'* yang memanfaatkan unsur-unsur kekuatan AS, yaitu untuk memastikan kekalahan abadi ISIS, melawan perluasan lebih lanjut dari Iran, dan penyelesaian politik untuk konflik Suriah (Yacoubian, 2018). Pendekatan *'three-D'* ini meliputi 3 dimensi, yaitu: (1) **dimensi pertahanan**, yang bertujuan untuk membebaskan area yang dikuasai oleh ISIS, memberikan pelatihan kepada pasukan oposisi, memberikan keamanan untuk upaya stabilisasi yang dipimpin oleh sipil, menghambat ekspansi lebih lanjut oleh Rezim Assad, meningkatkan pengaruh AS di Suriah, dan menghalangi penggunaan senjata kimia oleh Rezim Assad; (2) **dimensi diplomasi**, yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan Turki sebagai pemangku kepentingan regional utama dalam konflik Suriah, terlibat dengan Israel, Yordania dan Rusia untuk mencegah eskalasi yang tidak disengaja dalam perang bayangan antara Israel dan Iran dalam konflik Suriah, dan memperdalam keterlibatan dengan sekutu Eropa di Suriah; dan (3) **dimensi pengembangan**, yang bertujuan untuk menyoroti kesuksesan upaya-upaya yang dilakukan dengan pencapaian nyata pada konflik yang terjadi, upaya stabilisasi AS sebagai suatu keharusan strategis, dan memanfaatkan model tata kelola pada konflik untuk dijadikan sebagai template untuk masa depan AS (Yacoubian, 2018).

Selain itu Trump juga ingin mencegah pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia di dalam wilayah Suriah. Menteri Pertahanan AS, James Norman Mattis, mengatakan bahwa pasukan AS di Suriah tidak akan hanya memerangi ISIS, tetapi juga membantu mencapai penyelesaian politik untuk konflik Suriah yang luas (Ford, 2018). Trump dengan kebijakan luar negeri yang diterapkannya pada konflik Suriah berusaha untuk menjauhkan ancaman bagi AS dan sekutu AS dengan mencegah kelompok terror ekstrimis yang dapat menjadikan Suriah sebagai markas mereka, mencegah adanya perluasan pengaruh lebih jauh yang dilakukan oleh Rusia dan Iran, serta berusaha untuk mempertahankan konsensus internasional mengenai penggunaan senjata kimia (Ford, 2018).

Trump dengan kebijakan luar negeri yang diterapkannya pada konflik Suriah berusaha untuk menjauhkan ancaman bagi AS dan sekutu AS dengan mencegah kelompok terror

ekstrimis yang dapat menjadikan Suriah sebagai markas mereka, mencegah adanya perluasan pengaruh lebih jauh yang dilakukan oleh Rusia dan Iran, serta berusaha untuk mempertahankan konsensus internasional mengenai penggunaan senjata kimia (Ford, 2018).

2. Kebijakan Luar Negeri serta Alasan Rusia Terlibat pada Konflik Suriah

Prioritas kebijakan luar negeri Rusia berdasarkan dokumen-dokumen resmi dari pemerintahan Putin adalah untuk mempromosikan kepentingan Rusia sebagai kekuatan besar dan salah satu pusat paling berpengaruh di dunia modern dengan memastikan keamanan negara, melestarikan dan memperkuat kedaulatan dan integritas teritorialnya dan posisinya yang kuat dan berwibawa di dunia masyarakat, dalam rangka memajukan pertumbuhan potensi politik, ekonomi, intelektual, dan spiritualnya (Naeem, 2020). Menurut beberapa ahli, strategi Rusia di Suriah adalah untuk mengejar model 'lingkup pengaruh' negaranya yang berusaha untuk memaksimalkan keuntungan Rusia dan memberikan stabilitas dalam konflik Suriah (Yacoubian, 2021).

Suriah dengan wilayah geopolitiknya yang penting, telah menjadi wadah bagi berbagai negara untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Timur Tengah. Di bawah pemerintahan Vladimir Putin, Rusia bertekad untuk menjadi salah satu kekuatan besar di dunia dengan selalu memainkan peran aktif dalam politik dunia, salah satunya dalam keterlibatannya pada konflik Suriah. Dalam pandangan Rusia, kekalahan Rezim Assad akan memiliki konsekuensi bencana bagi stabilitas regional dan global. Menurut Putin, menggulingkan Assad akan membuat negara itu menjadi negara gagal seperti Libya dan Irak, dan akan menjadi markas bagi teroris untuk berkembang seperti yang dilakukan ISIS (Charap, Treyger, & Geist, 2019). Dalam hal ini, Putin pada kesempatan Forum Ekonomi Internasional di St. Petersburg mengatakan bahwa:

"We are not so much defending President Assad as we are Syrian statehood. We don't want there to be a situation similar to Libya, or Somalia or Afghanistan, in Syria."

"Kami tidak banyak membela Presiden Assad seperti kami adalah negara bagian Suriah. Kami tidak ingin ada situasi yang mirip dengan Libya, atau Somalia atau Afghanistan, di Suriah."

– Vladimir Putin

Rusia berfokus pada pengembangan strategi permainan akhir yang diupayakan untuk mempromosikan kepentingan Rusia di tiga fokus, yaitu pada konflik yang berlapis-lapis di Suriah, peran Rusia dalam dinamika regional di Timur Tengah, dan konsepsi Rusia yang lebih luas tentang tatanan global yang berkembang (Yacoubian, 2021). Rusia berusaha untuk menerapkan strategi yang praktis agar dapat meminimalisir kerugian yang akan dikeluarkan oleh militernya. Rusia berusaha untuk mempertaruhkan klaimnya atas aset-aset strategis utama, dan menyerahkan kekuasaan dan pengaruh di daerah-daerah di luar kendalinya. Strategi ini dijalankan dengan melakukan kerja sama dengan mitra Rusia yang

berupaya untuk melemahkan saingan yang mengancam strategi Rusia. Strategi Rusia di Suriah, yang disebut dengan “Doktrin Primakov”, menyatakan bahwa dunia unipolar yang didominasi oleh AS tidak dapat diterima oleh Rusia (Yacoubian, 2021).

Karena adanya keterlibatan dari AS, Rusia juga berupaya untuk menerapkan kebijakan dengan tidak melibatkan AS secara langsung. Hal ini dikarenakan risiko munculnya konfrontasi langsung antara Rusia dan AS yang dapat menyebabkan konflik lain diluar konflik Suriah. Rusia yang berpihak pada Rezim Assad, berusaha untuk menjadikan negaranya tetap berpengaruh dalam dunia internasional, mengejar perdamaian dan stabilitas regional dengan memusnahkan ISIS, balas dendam terhadap AS karena perilaku anti-Rusia sejak perang Rusia-Georgia pada tahun 2008 dan terhadap NATO di Ukraina, serta untuk mendukung Suriah yang merupakan sekutu Rusia, agar tidak digulingkan oleh pihak oposisi (Oligie, 2019).

Terdapat beberapa alasan Rusia mengintervensi konflik Suriah, yaitu: (1) adanya kepentingan geopolitik, geoekonomi dan geostrategis dan perlindungan pengaruh Rusia di Timur Tengah yang terancam oleh AS dan sekutu; (2) kebencian terhadap revolusi di Suriah; (3) adanya upaya penegakkan prinsip PBB dan Hukum Internasional mengenai tindakan non-intervensi dan kedaulatan negara; (4) adanya kehadiran kelompok terror ekstrimis yang berisiko menciptakan markas bagi teroris di Suriah; (5) adanya upaya untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga kelangsungan hidup Rusia dalam sistem internasional; dan (6) adanya kebutuhan untuk pertahanan dan pelestarian diri (Oligie, 2019).

Rusia berupaya untuk mendukung persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Suriah sebagai negara sekuler, demokratis, dan pluralistik dengan semua kelompok etnis dan agama yang hidup dalam damai dan keamanan serta menikmati hak dan peluang yang sama (Naeem, 2020). Strategi Rusia pada awal konflik Suriah adalah untuk membatasi keterlibatan pada konflik, dengan berfokus pada serangan udara yang terkonsentrasi di daerah-daerah penting bagi Rezim Assad, khususnya di wilayah Barat dan Barat Laut Suriah (Souleimanov & Dzutsati, 2018). Rusia merencanakan keterlibatan yang terbatas dengan kurun waktu yang jelas, yang diupayakan untuk mengurangi operasi pertempuran darat agar dapat mencegah kerugian kemanusiaan yang signifikan dan dapat menghasilkan reaksi domestic yang positif. Lebih jauh lagi, Rusia juga menggunakan tentara bayaran untuk membantu menciptakan kesan di dalam negeri bahwa korban jiwa dalam konflik itu rendah. Tercatat bahwa tidak lebih dari 4.500 personel Rusia berada di darat pada September 2016 dan 3.000 pada Maret 2018 (Charap, Treyger, & Geist, 2019). Hal ini disebabkan karena *The Russian Aerospace Forces* (VKS) hanya ditugaskan untuk bertindak sebagai mitra koalisi dari pasukan Iran, Hizbullah dan militer Assad.

Putin juga berupaya untuk menempatkan rintangan ke AS dan sekutu dalam usahanya meruntuhkan Rezim Assad. Putin berbicara kepada Majelis Federal dan mengatakan bahwa “mereka yang ingin menggulingkan rezim yang tidak diinginkan bertanggung jawab atas negara-negara di kawasan *Middle East and North Africa* (MENA) yang berubah menjadi

zona kekacauan dan anarki dari mana ancaman ke seluruh dunia sekarang berakar" (Charap, Treyger, & Geist, 2019). Menurut Putin, tindakan sepihak dan pemaksaan kerangka politik yang dilakukan AS ke negara lain akan menghasilkan kekacauan yang semakin besar (Charap, Treyger, & Geist, 2019).

Selain itu, Rusia juga berusaha untuk menghindari hasil militer yang merugikan dengan memprioritaskan serangan balik terhadap perubahan rezim di Suriah sebagai pertahanan masa depan bagi Rusia. Menurut seorang analis dari CAN Corporation, Michale Kofman, Rusia sedang mencoba untuk menghilangkan ancaman pemberontak terhadap Rezim Assad sambil secara bersamaan melegitimasi pasukannya sebagai bagian dari koalisi anti-ISIS. Di masa depan, Rusia kemungkinan akan mencari dukungan Eropa untuk proses politik baru, dan mencoba memaksa AS untuk bergabung (Kheyrian, 2019). Selain itu, Senator AS, John McCain, juga telah menyatakan bahwa Putin berusaha untuk memaksa AS untuk memilih antara kekalahan ISIS dan kekalahan Assad (Kheyrian, 2019).

Strategi *Offshore Balancing* Amerika Serikat pada Era Donald Trump Terhadap Rusia dalam Konflik Suriah

Analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan mengacu kepada data yang telah dipaparkan yang berupa runtutan peristiwa konflik Suriah, hubungan diplomatik antara AS dan Rusia, serta keterlibatan AS dan Rusia pada konflik Suriah dengan pengupayaan kepentingan nasional dari kedua negara tersebut. Teori dan konsep yang digunakan untuk melakukan elaborasi, yaitu *grand strategy*, *offshore balancing*, kepentingan nasional, dan aksi-reaksi. Berdasarkan data dan elaborasi teori dan konsep, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan strategi *offshore balancing* yang dilakukan oleh AS pada era Donald Trump terhadap Rusia, dilakukan sebagai bentuk 'reaksi' dari adanya 'aksi' intervensi langsung oleh Rusia pada konflik Suriah yang berupaya untuk mengembalikan posisi negaranya pada panggung internasional dan membuktikan pada dunia modern bahwa Rusia merupakan kekuatan besar yang berpengaruh. Strategi ini diterapkan oleh AS untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya yang diupayakan pada perluasan pengaruh, untuk melindungi *status quo* negaranya pada posisi paling utama dalam sistem internasional. Hal ini dilakukan AS dengan menerapkan kebijakan luar negeri yang difokuskan pada perlindungan integritas teritorial dan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, dengan memanfaatkan kekuatan regionalnya, yaitu Arab Saudi, untuk mencegah lahirnya kekuatan potensial seperti Rusia.

Adanya keterlibatan AS dan Rusia pada konflik Suriah menyebabkan konflik yang terjadi semakin tereskalasi dan tidak kunjung usai. Hal ini mengindikasikan adanya persaingan antara dua kekuatan besar, yaitu AS dan Rusia, yang dimana masing-masing dari negara tersebut menggunakan kekuatan militernya, serta menerapkan berbagai kebijakan luar negeri lainnya yang diupayakan untuk pencapaian kepentingan nasionalnya, baik dalam bidang ekonomi, politik, keamanan/militer, ideologi, ataupun tatanan dunia.

Berdasarkan gambaran dari penjelasan mengenai hubungan diplomatik antara AS dan Rusia pada konflik-konflik yang terjadi di dunia, hubungan yang tegang antara AS dan Rusia sudah dimulai sejak pasca Perang Dunia ke-II. Sejak masa itu, kedua negara terus berusaha mengejar kekuasaan dan kekuatan dengan memperluas pengaruhnya di dunia. Dalam hal ini, perspektif realisme dapat menjelaskan persaingan antara kedua negara tersebut. Morgenthau mendefinisikan kekuasaan dalam realisme bahwa:

“Whatever the ultimate goal of international politics, power will always be the immediate goal that takes precedence.”

“Apapun tujuan akhir dari politik internasional, kekuasaan selalu menjadi tujuan langsung yang didahulukan.”

– Morgenthau, 1985

Hubungan antara kedua negara tersebut dapat dijelaskan melalui sikap AS dalam menerapkan kebijakan luar negerinya yang berusaha melindungi status-quo dan mencegah kekuatan potensial apa pun yang mampu mengancam peran hegemoniknya dalam politik dunia. Disisi lain, Rusia juga berusaha untuk mengembalikan status negara besarnya di ranah internasional dan menerapkan keseimbangan kekuatan yang menguntungkan negaranya. Hal ini menyebabkan setiap tindakan yang dilakukan oleh satu pihak akan meningkatkan ketegangan dan kecurigaan di pihak yang lain, yang dapat mengarah kepada *security dilemma* dari kedua negara tersebut dalam mengejar keseimbangan kekuatan di dunia. Namun Putin, selama masa jabatan pertamanya di Kremlin telah menyatakan bahwa tujuan utamanya hanyalah untuk mengembalikan posisi Rusia dalam politik dunia sebagai aktor yang signifikan dan dihormati. Selain itu, ia juga ingin menggambarkan Rusia sebagai kekuatan dunia yang bertanggung jawab yang mampu memberikan solusi bagi masalah global (O & Felix, 2017).

Security Dilemma dari kedua negara tersebut dapat dilihat dari masing-masing kebijakan luar negerinya dalam resolusi konflik Suriah. Perspektif realisme dapat membantu untuk memahami alasan AS menerapkan strategi khusus untuk menanggapi Rusia. Realisme memperlihatkan bahwa AS dan Rusia berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing negaranya dalam sistem internasional yang anarki, dengan menerapkan kebijakan luar negeri yang berfokus pada ekonomi dan militer yang diupayakan pada pencegahan perluasan pengaruh dan penguasaan control wilayah yang dipengaruhinya, untuk tujuan pencapaian kekuasaan.

Lebih jauh lagi, terdapat satu alasan lebih dari alasan yang telah dikemukakan oleh Trump dalam konferensi persnya tentang keterlibatan AS pada konflik Suriah. Trump tidak hanya sekedar ingin memberantas terorisme, mempromosikan demokrasi, dan menghapus pasukan Iran dari Suriah, melainkan Trump juga berusaha untuk mengembalikan kejayaan AS pada masa pasca Perang Dingin, yaitu menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Hal ini dilakukan dengan mempertahankan pengaruh negaranya di wilayah Timur Tengah

sekaligus mencegah Rusia yang juga berupaya untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut, yang dapat mengancam kepentingan nasional dari AS.

Keterlibatan AS dalam konflik Suriah telah memanfaatkan strategi tingkat tinggi yang dijadikan sebagai rencana tindakan dalam mencapai tujuan politik yang lebih spesifik yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional. Tujuan politik AS tentu saja untuk menempatkan AS pada posisi paling utama di sistem internasional. Dalam usahanya, AS menerapkan strategi tingkat tinggi *offshore balancing* untuk menjaga keseimbangan kekuatan di wilayah Timur Tengah dan memastikan Rusia sebagai negara yang berpotensi menjadi *rising power*, tidak mengganggu AS pada ruang lingkup pengaruhnya. Selain itu, AS berusaha untuk mengejar sumber daya, kekayaan dan geografi geopolitik yang ada di Timur Tengah, dengan melindungi integritas teritorial dan memanfaatkan kekuatan regionalnya. AS merupakan salah satu negara yang paling layak untuk menerapkan strategi *offshore balancing*. Hal ini dikarenakan AS adalah negara dengan kekuatan besar yang terisolasi, yang dapat memanfaatkan instrumen kebijakan luar negeri dan sumber daya yang dimilikinya, untuk dapat mencegah Rusia yang berusaha mengejar kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri AS pada konflik Suriah lebih mengarah kepada pemanfaatan kekuatan negaranya dalam bentuk militer, untuk mendapatkan kekuasaan, serta merespon intervensi yang dilakukan Rusia sebagai negara pesaing dalam konflik Suriah.

Melalui intervensi yang dilakukan pada konflik Suriah, AS berusaha mempertahankan dan memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dengan merespon tindakan intervensi yang dilakukan Rusia pada konflik tersebut, yang berusaha untuk membendung pengaruh AS dan memperluas pengaruh negaranya. Trump menerapkan strategi kebijakan luar negeri dengan memanfaatkan ketidakstabilan, gejolak dan transisi kekuasaan yang terjadi di Suriah, yang dijalankan dengan menggunakan model keamanan kerja sama dengan kekuatan besar lainnya seperti Turki, Arab Saudi, Inggris dan sekutu lainnya. Strategi ini bertujuan untuk mengamankan pengaruhnya di Timur Tengah, dan untuk mempertahankan status negara adidaya AS dari Rusia. Dengan adanya keterlibatan Rusia yang berpihak kepada Rezim Assad, yang berusaha untuk mendapatkan kembali status negara adidainya dengan memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, AS mendapatkan ancaman dari Rusia sebagai musuh AS yang dapat mengancam kelangsungan hidup AS.

Kebijakan luar negeri yang difokuskan pada bidang militer oleh AS, dilakukan untuk merespon adanya campur tangan militer dari Rusia. Rusia yang juga terlibat pada konflik Suriah sebagai pihak pro Assad, menjadikan Rusia sebagai musuh dari AS yang menentang Assad dan mendukung pihak oposisi dengan tuntutan adanya pergantian rezim di Suriah. Assad sebagai salah satu aliansi Rusia di Timur Tengah, membuat Rusia mempertahankan kedudukan Assad. Hal ini dilakukan Rusia untuk tetap mengontrol wilayah Timur Tengah dan mendapatkan sumber daya alam yang dimiliki Suriah. Namun disisi lain, AS yang juga memiliki kepentingan nasional yang terhalang oleh Rezim Assad, merespon tindakan dukungan yang diberikan oleh Rusia dengan memanfaatkan militer negaranya untuk mengalahkan Rusia dan Rezim Assad di Suriah. Intervensi yang dilakukan Rusia pada

konflik Suriah dapat mengancam AS serta mengganggu kepentingan nasional AS. Oleh karena itu, AS menerapkan kebijakan luar negeri yang menjadi reaksi akibat adanya tindakan pencapaian kepentingan Rusia melalui intervensi yang dilakukannya, dengan menggunakan strategi tingkat tinggi *offshore balancing* untuk mencapai kepentingan nasional AS.

Perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh AS dan Rusia pada konflik Suriah menghasilkan persaingan yang panjang bagi kedua negara tersebut. Keduanya saling berusaha untuk mencapai tujuan akhir dari politik internasional, yaitu kekuasaan. Pada satu sisi, AS berupaya untuk melindungi keberadaan negaranya pada sistem internasional dari kekuatan potensial yang mengancam stabilitas keamanan. Namun, disisi lain, Rusia juga berusaha untuk mengembalikan keberadaan negaranya pada sistem internasional. Kedua negara tersebut tidak terlibat dalam perang secara langsung, melainkan dengan bersaing dengan melakukan penyebaran pengaruh di wilayah Timur Tengah, dengan menjadikan Suriah sebagai 'alat' untuk mencapai kepentingan nasional dari masing-masing kedua negara tersebut.

SIMPULAN

Persaingan antara AS dan Rusia pada Konflik Suriah dapat dilihat dari keberpihakan masing-masing negara, dimana Rusia berpihak kepada Rezim Assad dan AS berpihak kepada kelompok oposisi. Persaingan ini dapat dijelaskan melalui perspektif realisme yang beranggapan bahwa tujuan akhir dari politik internasional adalah pengejaran kekuasaan.

Rusia yang berupaya untuk memperluas pengaruh sekaligus mengembalikan keberadaan negaranya pada sistem internasional, melakukan intervensi militer secara langsung pada konflik Suriah dengan mendukung Rezim Assad. Rusia berupaya untuk mempertahankan kedudukan Rezim Assad di Suriah karena Rezim Assad merupakan satu-satunya pihak yang dapat menjamin keberadaan pengaruh Rusia di wilayah Timur Tengah. Hal ini dilakukan Rusia guna mempertahankan pengaruh negaranya di wilayah Timur Tengah, sekaligus menempatkan rintangan kepada AS untuk mencegah kerugian yang akan didapatkan apabila AS berhasil menggulingkan Rezim Assad.

AS, disisi lain, juga melakukan intervensi militer secara langsung pada konflik Suriah sebagai bentuk 'reaksi' dari adanya 'aksi' intervensi yang dilakukan oleh Rusia. AS menerapkan strategi *offshore balancing* untuk mengamankan salah satu dari tiga wilayah geopolitik yang penting di dunia, yaitu Timur Tengah. Hal ini dilakukan AS dengan mencegah Rusia sebagai kekuatan potensial dan menjaga keseimbangan kekuatan sekaligus melindungi integritas teritorial di wilayah Timur Tengah. Tujuan akhir AS dalam penerapan strategi ini adalah untuk mencapai posisi paling utama dalam sistem internasional. AS berupaya untuk menggulingkan Rezim Assad untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Timur Tengah, serta mencegah Rusia dalam usahanya mengejar kebangkitan status adidaya negaranya. Hal ini dilakukan AS karena adanya risiko yang ditimbulkan dari intervensi

yang dilakukan Rusia pada konflik yang terjadi, yang berpotensi menjadi *rising power* sekaligus musuh yang dapat mengancam upaya pengejaran hegemoni AS dalam tatanan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2017). *Alasan Pemerintah meminta bantuan Militer Kepada Rusia dalam Konflik Tahun 2015 - 2016*. Repository.uinjkt.ac.id.
- Aveline, V. (2018). *Eskalasi Konflik Suriah Pasca Intervensi AS (Tahun 2013-2016)*. repository.unpar.ac.id.
- Baldwin, D. A. (2000). *Success and Failure in Foreign Policy*. Annual Review of Political Science, Vol. 3, No. 1, pp. 167 – 182
- Brands, H. (2016). *The Limits of Offshore Balancing* (Strategic Studies Institute (U.S.) & Army War College (U.S.), Eds.). Strategic Studies Institute, U.S. Army War College Commandant (AWCC-DSI/Publications).
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave Macmillan UK.
- Buzan, B. (1987). *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*. London, Palgrave Macmillan
- Charap, S., Treyger, E., Geist, E. (2019). *Understanding Russia's Intervention in Syria*. Rand Corporation. Retrieved July 19, 2022, from https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3180.html
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson. <http://repository.unmas.ac.id/media/s/journal/EBK-00121.pdf>
- Danin, R. M. (2012). *The 'Friends of Syria' Tunis Meeting*. Council on Foreign Relations. Retrieved July 13, 2022, from <https://www.cfr.org/blog/friends-syria-tunis-meeting>
- David A. Baldwin. (2000). *Success and Failure in Foreign Policy*. Annual Review of Political Science, 3(1), 167 – 182.
- Dermawan, R. (2019). The National Interest Concept in A Globalised International System. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 30-45.
- Fahham, A. M., & Kartaatmaja, A. M. (2014). Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya. *Politica*, 5(1), 37 - 60.
- Freear, M. (2016). *White Papper: Syrian Stabilization and Reconstruction*. American Security Project. Retrieved July 18, 2022, from <https://www.americansecurityproject.org/white-paper-syrian-stabilization-and-reconstruction/>
- Handayani, N. (2017). *Upaya Bashar Al Assad dalam Menangani Konflik di Suriah*. digilib.uin-suka.ac.id.

- Herlambang, A., & Wulan, S. R. (2020). Dinamika Konflik Internal Di Suriah Di bawah Kepemimpinan Hafez Al-Assad Yang Berdimensi Internasional. *Jurnal Transborders*, 4(1), 1-12.
- Humud, C. E. (2022). *Syria and U.S. Policy*. Congressional Research Service.
- Humud, C. E., Blanchard. C. M. (2020). *Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response*. Congressional Research Service.
- Ifesinachi, K., Adibe, R. (2014). *The United States and Russian Governments Involvement in the Syrian Crisis and the United Nations's Kofi Annan Peace Process*. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 5, No. 27, pp. 1154 – 1162.
- Kirss, A. (2018). Does Grand Strategy Matter? *Strategic Studies Quarterly*, 12(4), 116-132.
- Kupchan, C. A. (2021). *Trump's Nineteenth-Century Grand Strategy*. Washington, D. C. Foreign Affairs.
- Layne, C. (1997). From Preponderance to Offshore Balancing: America's Future Grand Strategy. *International Security*, 22(1), 86-124.
- Layne, C. (2002). Offshore balancing revisited. *The Washington Quarterly*, 25(2), 233-248.
- Layton, P. (2012). The Idea of Grand Strategy. *The RUSI Journal*, 157(4), 56-61.
- Marleku, A. (2013). National Interest and Foreign Policy: The Case of Kosovo. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 4(3), 415-419.
- Mhannan M., Boni, A. L., Nabi, G., Akil, R., Mohra, N., Gretel., Gabi, (2018). *Datasets: Russian Airstrikes Database*. Syrian Archive. Retrieved July 19, 2022, from <https://syrianarchive.org/en/dataset/s/russian-airstrikes>
- McDonough, D. S. (2011). Grand Strategy, Culture, and Strategic Choice: A Review. *Journal of Global Strategic Studies*, 13(4), 1-33.
- McCarthy, N. (2021). *10 Years Later: Key Numbers Behind the Wars in Syria*. Statista. Retrieved August 1, 2022, from <https://www.statista.com/chart/24418/key-numbers-about-the-war-in-syria/>
- Mossalanejad, A. (2018). The Middle East Security and Donald Trump's Grand Strategy. *Geopolitics Quarterly*, 13(4), 20 - 52.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15(1), 127-138.
- Naeem, S. A. (2020). *Russia's Foreign Policy Towards Syria: A Post Arab Spring Study*. Strategy International Journal of Middle East Research, 2(2), 15 – 24.
- Neack, L. (2019). *Studying Foreign Policy Comparatively*. London. The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
- Oligie, N. C. (2019). *Why Russia is Involved in the Syrian Civil War:*

- One Issue, Many Views*. AUDRI, Vol. 12, No. 1, pp. 93 – 136.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, 5(9), 1-8.
- Rahmawati, A. (2020). *Upaya Sekuritisasi Amerika Serikat dalam Konflik di Suriah pada Masa Kepemimpinan Presiden Donald Trump*. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
- Council on Foreign Relations. *The Syrian Conflict is About to Intensify*. Retrieved December 7, 2022, from <https://www.cfr.org/timeline/trump-s-foreign-policy-moments>
- Reuters, P. (2017). *Russia Starts to Establish Permanent Presence at its Syrian Bases*. Middle East Eye. Retrieved July 20, 2022, from <https://www.middleeasteye.net/fr/news/russia-starts-establish-permanent-presence-its-syrian-bases-590935799>
- United Nation of Human Rights (UNHR). (2021, September 24). *Oral Update on the Extent of Conflict-Related Deaths in the Syrian Arab Republic Background Note on the Statistical Analysis*. OHCHR. Retrieved December 21, 2021, from https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/BackgroundTechnicalNote_Syria.pdf
- Russell, M. (2022). *U.S. – Russia Relations: Geopolitical, Security, Economic and Human Dimensions*. European Parliamentary Research Service. Retrieved August 10, 2022, from [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698919/EPRS_BRI\(2022\)698919_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698919/EPRS_BRI(2022)698919_EN.pdf)
- Sadat, H. M., Jones, D.B. (2009). *U.S. Foreign Policy Toward Syria: Balancing Ideology and National Interest*. Middle East Policy, Vol. 16, No. 2, pp. 93 – 105
- Sahide, A., Hadi, S., Setiawati, S. M., & Cipto, b. (2015). The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2), 118 - 129.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). *World Military Expenditure Passes \$2 Trillion for First Time*. Retrieved July 6, 2022, from <https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time>
- Soebroto, M. M. (2019). *Intervensi Militer Amerika Serikat di Suriah Era Donald Trump*. Jember, Jawa Timur, Indonesia.
- Souleimanov, E., Dzutsati, V. (2018). “Russia’s Syria War: A Strategic Trap?”. Middle East Policy, Vol. 25, No. 2, pp. 42 – 50.
- Steven A. Cook. (2019, October 7). *The Syrian Conflict is About to Intensify*. Council on Foreign Relations. Retrieved December 19, 2021, from <https://www.cfr.org/in-brief/syrian-conflict-about-intensify>
- The International Institute for Strategic Studies. (2020). *Strategic Survey 2020: The Annual Assessment of Geopolitics*. New York, USA. Routledge.
- United States Department of State. (2021). *U.S. Relations with Russia*. Bilateral Relations Fact Sheet, Bureau of European and Eurasian Affairs. Retrieved December 22, 2021, from

- <https://www.state.gov/u-s-relations-with-russia/>
- Ullyot, J., & Yacoubian, M. (2021, January 1). *Syria Timeline: Since the Uprising Against Assad*. United States Institute of Peace. Retrieved December 18, 2021, from <https://www.usip.org/syria-timeline-uprising-against-assad>
- Umar, A. R. M. (2014). *The National Interest in International Relations Theory*. *Indonesian Journal of International Studies*, 1(2), 185-190.
- Wardhana, A., & Dugis, V. M.A. (2019). Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump. *Global Strategis*, 13(2), 141 - 156.
- Watson Institute for International & Public Affairs, Brown University. *Cost of War*. Retrieved July 8, 2022, from <https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/WarDeathToll>
- Watson Institute for International & Public Affairs, Brown University. *Cost of War*. Retrieved July 9, 2022, from <https://watson.brown.edu/costsofwar/military-spending-2018>
- Webber, M., Smith, M., Allen, D., Collins, A., Morgan, D., Ehteshami, A. (2002). *Foreign Policy in a Transformed World*. Routledge, New York.
- Widodo, A. S. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Konflik Suriah Melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa*. eprints.uad.ac.id.
- Yacoubian, M. (2017). *Critical Junctures in United States Policy Towards Syria: An Assessment of the Counterfactuals*. United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved July 18, 2022, from <https://www.ushmm.org/m/pdfs/Yacoubian-Critical-Junctures-US-Policy-Syria.pdf>
- Yacoubian, M. (2018). *U.S. Policy Toward Syria: Part I*. United States Institute of Peace. Retrieved July 11, 2022, from <https://www.usip.org/publications/2018/09/us-policy-toward-syria-part-i>
- Yacoubian, M. (2021). "What is Russia's Endgame in Syria?". United States Institute of Peace. Retrieved August 1, 2022, from <https://www.usip.org/publications/2021/02/what-russias-endgame-syria>
- Zachary Laub. (2021, March 17). *Syria's Civil War: The Descent into Horror*. Council on Foreign Relations.
- Zahendra, F. (2018). *Upaya Containment Amerika Serikat terhadap Rusia dalam Konflik Suriah*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia